

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Alrasyid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Alrasyid, Harun. *Hubungan antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Amin, S.M., *Demokrasi dalam Bahaja? (UU Pemilihan Umum dalam Sorotan)*, Djakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970.
- Arsil, Fitra, *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Azhari, Aidul Fitriadi. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Azwar, Rully Chairul, "Kedaulatan Rakyat dan Sosio-Demokrasi" makalah disampaikan dalam acara *Focus Group Discussion* kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Islam Indonesia, Rabu, 11 Mei 2016.
- Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Bagian 2: Kajian Akademik tentang Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam Rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Peran MPR dalam Memberikan Tafsir Konstitusi*, Jakarta, 2018.
- Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ringkasan Laporan Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2017*, Jakarta, 2018.
- Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Bagian 1: Kajian Akademik tentang Reformulasi Haluan Negara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*, Jakarta, 2018.

- Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan dalam Preferensi Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara*, Jakarta, 2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Busro, Abubakar, dan Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Chaidir, Ellydar. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2007
- Dwipayana, AA GN Ari, “Kembali ke Hakikat Res Publicata” dalam *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Ekatjahjana, Widodo. *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra, 2008.
- Fajar, Mukhtie. *Pemilu dan Demokrasi*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2013.
- Fajar, Mukhtie, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2013.
- Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*, Bandung: Yrama Widya, 2007.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2013.
- Garner, Bryan A., (ed), *Black’s Law Dictionary*, Eighth Edition, West Publishing, United States of America, 1990.
- Hadjon, Philip M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Hallaq, Wael B., diterjemahkan oleh Akh Minhaji, *Ancaman Paradigma Negara Bangsa Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010.

- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Haris, Syamsuddin. *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hasan, Noorhaidi. *Islam Politik di Dunia Kontemporer Konsep Genealogi dan teori*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Hidayat, L. Misbah. *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Hikam, M. AS. (editor), *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga kerjasama Pustaka Pelajar, 1999.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Keenam. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- _____, *Ilmu Negara*, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- _____, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- _____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- _____, dan Riri Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Hussain, Syekh Saukat. *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ibrahim, Harmaily, *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Bakti, 1978.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Kamis, Margarito. *Kekuasaan Presiden Indonesia*, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2014.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Ringkasan Eksekutif Memelihara Momentum Perubahan Evaluasi Lima tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009*, Jakarta, 2010.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 Kerja Nyata Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian*, Jakarta, 2017.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014*, Jakarta, 2015.
- Kusumah, Mulyana W. dkk, *Menata Politik Paska Reformasi*, Jakarta: KIPP Indonesia, 2000.
- Lubis, M. Solly. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy an Public Policy)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Hukum Tatanegara Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- _____, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* . Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

_____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2000*, Buku III Jilid 1, *Lembaga Permusyawaratan Perwakilan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Ketiga Jilid 15, *Risalah Rapat Sub Komisi C-1 (Sidang Tahunan 2000)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2000.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

_____, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

_____, *Membedah UUD 1945*, Ed. Moh. Fadli, Cetakan Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.

_____, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

_____, *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

_____, dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press.

Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media, 2012.

Marzuki, Laica. *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mayo, Henry B., *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960.

Mukhlis dan Moh. Saleh. *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.

- Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoretis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, Buku V Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010.
- Nasution, Adnan Buyung, “ Mengidentifikasi Gerakan Demokrasi: Refleksi dan Proyeksi Pengalaman LBH” dalam *Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000: Sebuah Refleksi Pengalaman Dua Dasawarsa LSM*, Rustam Ibrahim (ed). Jakarta: Center for The Study of Democracy-LP3ES,1995.
- Nasution, Adnan Buyung. *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Natabaya ,H.A.S.. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
- Nazriyah, Riri. *MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Nurjahjo, Hendra (editor), *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress, 2018.
- Pamungkas, Sri Bintang, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Poerbopranoto, Koencoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Cetakan Keempat. Bandung: Eresco, 1987.
- Poerwadarminta, W.J.S. (Penyusun), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, Jakarta: 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ridwan, *Fiqih Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta: 2009.

Risalah Rapat Paripurna Ke-6 Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI Periode 1999-2004, 26 September 2004.

Rofiqul-Umam Ahmad, dkk: Editor. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Para Pakar Hukum*. Jakarta: The Biography Institute, 2007.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Ketiga Jilid 8, Risalah Rapat Paripurna Ke-8 Sidang Umum MPR RI, 14 Oktober 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1999.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Ketiga Jilid 8, Risalah Rapat Paripurna Ke-9 Sidang Umum MPR RI, 15 Oktober 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1999.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Ketiga Jilid 13, Risalah Rapat Paripurna Ke-12 Sidang Umum MPR RI, 19 Oktober 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1999.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.

Setiawan, Dian Bakti. *Pemberhentian Kepada Daerah Mekanisme Pemberhentiannya menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

Soemantri, Sri. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito, 1976.

_____, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*, Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015.

Suriaatmadja, Arifin P., *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 1986.

Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Tambunan, A.S.S. *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya: Suatu Pengamatan dan Analisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Wahidin, Samsul. *MPR RI Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Yamin, Muhammad. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960.

Yuda, Hanta. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Yusuf, Slamet Effendy. dan Umar Basalim. *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama. Jakarta: HUMA, 2002.

Zaman, Nurus. *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Paradigma Baru Upaya Mempercepat Tujuan Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Cetakan Kedua. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Makalah, dan Jurnal Hukum

Ansori, Lutfil, "Pertanggungjawaban Wakil Presiden menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No.1, Juni 2014.

Attamimi, A. Hamid S., "Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", *Disertasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Azhari, Aidul Fitriadi, "Penafsiran Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pembentukan Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi (Studi terhadap Penafsiran UUD 1945 dan Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di

Indonesia)”, *Disertasi*, Program Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Harun Alrasid,” Mungkinkah Presiden diturunkan di Tengah Jalan”, *Majalah Tempo*, No. 19/XXIX/ 10-16 Juli 2001.

Istinah, Siti Rodhiyah Dwi, “Gagasan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Volume XXVIII, No. 2 Desember 2012.

Istinah, Siti Rodhiyah Dwi, “Pola Ideal Pertanggungjawaban Presiden dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Era Reformasi”, *Disertasi*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Kamis, Margarito, “Gagasan Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Pembatasan Kekuasaan Presiden oleh MPR 1999-2002”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Laksono, Fajar, *Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Legislasi Tahun 2004-2015)*, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Latif, Abdul, “Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai” dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009.

Mahfud MD, “Tap MPR tentang Etika Pejabat”, *Koran Sindo*, 12 Desember 2015. *Majalah Tempo*, No. 12/XXX/21-27 Mei 2001.

Nadir, “Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden”, *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 2, Juni, 2012.

Oktaryal, Agil, “Haluan Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Subekti, Valina Singka, ”Proses Perubahan UUD 1945 di MPR RI 1999-2002 dalam Transisi Demokrasi di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Sulardi, “Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *UNISIA*, Vol. XXXII, No, 71 Januari, 2011.

Widayati, Absori, dan Aidul Fitriicia Azhari, “Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Media Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2014.

Website

Ahmad Redi, “UU Lembaga Kepresidenan”
<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/04/10/nmkwsm52-uu-lembaga-kepresidenan>, 24 Maret 2015.

Dian Aulia, “Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Menjelang Pilpres”,
<http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-nasional/963-rancangan-undang-undang-lembaga-kepresidenan-menjelang-pilpres.html>, diakses tanggal 24 Maret 2016.

<http://www.mpr.go.id/posts/ahmad-basarah-sidang-tahunan-mpr-akan-menjadi-tradisi-kenegaraan>, diakses tanggal 16 Agustus 2018 pukul 14.24 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/512421/sidang-tahunan-mpr-perlu-landasan-hukum-yang-tepat>, diakses tanggal 20 Agustus 2018.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150814_indonesia_pida_to_jokowi, diakses tanggal 08 Maret 2018.

<https://www.liputan6.com/news/read/93957/bingung-sk-wapres-fraksi-dpr-mengusulkan-interpelasi>, diakses tanggal 06 Maret 2018

<https://www.rmol.co/read/2018/08/16/352760/Sidang-Tahunan-Wadah-Pencapaian-Kinerja-Lembaga-Negara-tanggal-28-Agustus-2018>. 28 Agustus 2018.

<https://www.viva.co.id/arsip/658341-sidang-tahunan-adalah-perintah-tatib-mpr>, diakses tanggal 11 April 2019, pukul 14.25 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/512421/sidang-tahunan-mpr-perlu-landasan-hukum-yang-tepat>, diakses tanggal 4 Maret 2019, pukul 10.15 WIB.

<https://www.viva.co.id/arsip/658341-sidang-tahunan-adalah-perintah-tatib-mpr>, diakses tanggal 11 April 2019, pukul 14.25 WIB.

Janedjri M. Gaffar, “Sidang Tahunan MPR 2015”,
<https://nasional.sindonews.com/read/1030328/18/sidang-tahunan-mpr-2015-1438915322>, diakses tanggal 4 Maret 2019, pukul 10.15 WIB.

<http://www.koran-jakarta.com/sidang-tahunan-jadi-forum-laporan-kinerja-pemerintah/>, diakses tanggal 21 April 2019, pukul 14.45 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180411172952-12-290109/jejak-panas-boediono-dan-sri-mulyani-di-petaka-century>., diakses tanggal 15 Mei 2019, pukul 15.12 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b8ef9a9e72e7/akhir-drama-pansus-century/>, diakses tanggal 15 Mei 2019, pukul 13. 35 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2013/11/15/1606341/KPK.Pastikan.Tahan.Budi.Mulya>. diakses tanggal 15 Mei 2019, pukul 17. 10 WIB.

https://www.liputan6.com/news/read/755291/pemeriksaan-kasus-century-kpk-istimewakan-wapres-boediono?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses tanggal 17 Mei 2019, pukul 10. 35 WIB.
Lihat Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PNJKT.SEL Tahun 2018

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2019/02/17/pertanggungjawaban-kepala-daerah-belum-mencerminkan-sistem-laporan-pertanggungjawaban-yang-demokratis>, diakses tanggal 25 Juni 2019, pukul 15.35 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2009-2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Putusan Pengadilan

Putusan MK No.73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Drs.Yana Suryana, M.Si, tanggal 17 Januari 2019, pukul 14.22 WIB di Gedung Bharana Graha, lantai 3, Komplek MPR/DPR/DPR, Jalan Gatot Subroto No, 6 Jakarta Pusat.

